

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* Jilid I. (Jakarta: konstitusi Press. 2006)
- Bintoro, Sutarno, dan Ginting, Johnson Ridwan. *Profil Lembaga Antikorupsi di Berbagai Negara*. (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2014)
- Chaerudin, dkk.. *Strategi Pencegahan dan Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. (Bandung: PT. Refika Aditama. 2009)
- Gerung, Rocky. *Etos Politik KPK dalam Buku Jangan Bunuh KPK Perlawanan Terhadap Usaha Pemberantasan Korupsi* (Jakarta: Kompas, 2009)
- Harun, Refly. *Menjaga Denyut Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*. (Jakarta: Konstitusi Pers. 2010)
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Profil Lembaga Antikorupsi di Berbagai Negara, Dasar Hukum, Pembentukan, Kewenangan, Anggaran, SDM, Struktur Organisasi, Kantor Perwakilan, Gedung, Kontak Informasi*. (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi. 2014)
- Marzuki, Peter Mahmud. *“Penelitian Hukum”*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011)
- Siahaan, Monang. *Perjalanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Penuh Onak Duri*. (Jakarta: P.T. Gramedia. 2014)

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
75
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor: 140
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor: 165
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor: 137
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor: 197
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-
006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kejaksaan Republik Indonesia

Jurnal

- Iksan, Muchamad. “*Asas Legalitas dalam Hukum Pidana*”. Jurnal
Serambi Hukum. Vol.11 (Februaru-Juli 2017)

Mayang Abrilianti, 2021

**KEDUDUKAN DEWAN PENGAWAS KPK DITINJAU DARI
STRUKTUR KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

www.upnvj.ac.id–www.library.upnvj.ac.id–www.repository.upnvj.ac.id

Matthew Stephenson, “*Specialised anti-corruption courts: Philippines*”. U4 Brief. Edisi Juli 2016 No.3. U4. 2016

Yulianto. “*Politik Hukum Revisi Undang-Undang KPK yang Melemahkan Pemberantasan Korupsi*”. Jurnal Cakrawala Hukum. Vol.11 No.1 (April 2020)

Sumber Lain

Prabowo, Haris. 2019. *Jokowi Setujui SP3 Kasus Korupsi dan Dewan Pengawas di Revisi UU KPK*. <https://tirto.id/jokowi-setujui-sp3-kasus-korupsi-dewan-pengawas-di-revisi-uu-kpk-eh1X>, diakses pada 18 Februari 2021 pada pukul 13.51 WIB.

Jaksa Agung Muda Pengawas, https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?id_u=26, diakses pada Selasa 16 Februari 2021. https://lawphill.net/statutes/presdecs/pd1978/pd_1486_1978.html, diakses pada tanggal 14 Juni 2021 Pukul 16.26 WIB https://lawphil.net/statutes/repacts/ra1977/ra_8249_1977.html, diakses pada tanggal 14 Juni 2021 pukul 16.34 WIB

Wawancara

Lalola Easter. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW). *Interview Pribadi*. Jakarta, 24 Maret 2021.

Dr. Wicipto Setiadi, S.H,M.H. Dosen Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. *Interview
Pribadi*. Jakarta, 26 Maret 2021.

Dr. Harjono, S.H, MCL.. Anggota Dewan Pengawas KPK.
Interview Pribadi. Jakarta, 16 April 2021.